

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran Lurah dalam mengatasi kendala pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran lurah sangat penting dalam mengoordinasikan berbagai pihak terkait, seperti RT/RW dan tokoh masyarakat, guna menyampaikan informasi mengenai kewajiban pembayaran PBB secara tepat dan masif.
2. Strategi sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan mencakup pemasangan spanduk, penyebaran informasi melalui media sosial, penyampaian informasi langsung melalui forum RT/RW, serta penyuluhan di forum musyawarah warga. Hal ini menjadi langkah awal dalam mengatasi hambatan pemahaman dan kesadaran masyarakat.
3. Pelayanan administrasi dan fasilitas yang diberikan oleh kelurahan turut mendukung pencapaian target, meskipun kewenangan pembayaran PBB berada di UPTD dan pihak bank. Kelurahan berperan sebagai fasilitator dalam penyediaan tempat dan informasi, terutama melalui pelaksanaan kegiatan “peling” (penyuluhan keliling).
4. Hambatan utama yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur PBB, minimnya partisipasi dalam kegiatan lingkungan, serta masih adanya praktik pembayaran tidak resmi yang menimbulkan tunggakan.
5. Lurah berupaya mengatasi kendala tersebut melalui pendekatan edukatif dan komunikatif, serta mendorong keterlibatan RT/RW sebagai mitra strategis. Pendekatan ini terbukti meningkatkan partisipasi warga meskipun masih diperlukan inovasi, seperti media

visual dan edukasi berkelanjutan, untuk menjangkau kelompok masyarakat tertentu seperti lansia dan warga dengan literasi rendah.

5.2 Saran

1. Pihak kelurahan sebaiknya meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi melalui metode yang lebih variatif, seperti edukasi berbasis video atau infografis sederhana yang dapat diakses oleh semua kalangan.
2. Perlu adanya pelatihan berkala bagi RT/RW, agar mereka dapat menjadi penyampai informasi PBB yang efektif dan memahami regulasi terkini seputar pajak.
3. Koordinasi dengan UPTD dan lembaga keuangan perlu diperkuat agar pelayanan yang difasilitasi di kelurahan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak warga.
4. Pemerintah daerah disarankan untuk menyediakan loket pembayaran keliling atau layanan berbasis digital yang lebih mudah diakses warga, terutama bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan sistem online.
5. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai manfaat dari pembayaran PBB yang tepat waktu, agar terbentuk kesadaran kolektif bahwa pajak merupakan kontribusi penting bagi pembangunan lingkungan mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Siagian, S. P. (2003). *Teori dan Praktik Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sedarmayanti. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Thoha, M. (2003). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rohman, A. (2019). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, J. (2010). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Effendy, O. U. (2006). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dwijowijoto, R. N. (2004). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Handayaniingrat, S. (2005). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: CV Haji Masagung.

B. JURNAL

- Kalalo, F. J. (2015). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 115–127.
- Sineke, A., & Sahertian, J. (2017). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 45–56.
- Aulia, D., & Suryadi, T. (2020). Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 70–82.
- Wibowo, A. (2021). Peran Lurah dalam Pelayanan Publik Terhadap Peningkatan Kesadaran Pajak Daerah. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 8(2), 33–41.
- Sutrisno, B. (2018). Strategi Pemerintah Kelurahan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 22(1), 54–63.
- Ramadhan, I., & Prasetyo, Y. (2020). Efektivitas Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Perkotaan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(3), 101–109.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

” Peran Lurah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan”

No	Indikator	Pertanyaan
1.	Sosialisasi dan Edukasi	1. Sebagai Lurah, bagaimana strategi khusus yang digunakan kelurahan Jatimulya dalam men sosialisasikan pentingnya PBB kepada masyarakat? 2. Bentuk kegiatan sosialisasi apa saja yang dilakukan oleh pihak kelurahan Jatimulya terkait pembayaran PBB dan Apakah kegiatan sosialisasi tersebut melibatkan RT/RW atau tokoh masyarakat setempat? (Sosialisasi) 3. Menurut bapak, Sejauh mana edukasi yang dilakukan berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB? (Edukasi)
2.	Fasilitas dan Pelayanan	1. Apa saja fasilitas yang disediakan oleh kelurahan untuk menunjang proses pelayanan PBB (contoh: loket pembayaran, ruang konsultasi, komputer/sistem informasi)? dan apakah fasilitas tersebut memadai untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dalam urusan pembayaran PBB? (fasilitas)

		2. Bagaimana upaya kelurahan dalam memastikan bahwa staf yang melayani urusan PBB bersikap ramah, cepat, dan tanggap terhadap kebutuhan warga? (pelayanan)
3.	Koordinasi dan Kolaborasi	1. Bagaimana Lurah memberikan arahan khusus kepada staf kelurahan atau petugas PBB dalam pelaksanaan tugasnya? 2. Apakah kelurahan menjalin kerja sama dengan lembaga lain (seperti bank, koperasi, atau lembaga masyarakat) dalam membantu proses pembayaran atau sosialisasi PBB?
4.	Pengawasan dan Evaluasi	1. Bagaimana cara Bapak/Ibu memastikan bahwa staf kelurahan menjalankan tugas pelayanan dan sosialisasi PBB dengan baik? 2. Apakah Bapak/Ibu melibatkan staf, RT/RW, atau tokoh masyarakat dalam proses evaluasi dan perbaikan kinerja pencapaian PBB?
5.	Partisipasi Masyarakat	1. Apa langkah-langkah yang telah diambil oleh BAPENDA dan Lurah Kelurahan Jatimulya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB?

PEDOMAN WAWANCARA

” Peranan Lurah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan”

No	Indikator	Pertanyaan
1.	Sosialisasi dan Edukasi	1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bertugas sebagai staf yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Jatimulya? dan Apa saja tugas dan tanggung jawab utama Bapak/Ibu dalam pengelolaan PBB? 2. Apa saja bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan kelurahan untuk meningkatkan kesadaran warga membayar PBB? (Sosialisasi) 3. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat cukup menerima dan memahami informasi yang disampaikan melalui sosialisasi? (Sosialisasi) 4. Bagaimana edukasi yang dilakukan sudah mencakup berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang berpendidikan rendah atau lansia? (edukasi) .
2.	Fasilitas dan Pelayanan	1. Apakah ada dukungan teknologi informasi (seperti komputerisasi, aplikasi pajak, atau sistem pembayaran digital) untuk memudahkan pelayanan PBB? 2. Seberapa cepat dan efektif pelayanan

		diberikan kepada warga yang ingin melakukan konsultasi atau pembayaran PBB?
3.	Koordinasi dan Kolaborasi	1. Bagaimana bentuk koordinasi antara Lurah dengan staf PBB dalam upaya pencapaian target PBB? 2. Apakah ada kerja sama antara kelurahan dengan pihak lain seperti RT/RW, tokoh masyarakat, atau Bapenda dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB?
4.	Pengawasan dan Evaluasi	1. Bagaimana keterlibatan Lurah dalam memantau proses pelayanan PBB kepada masyarakat? 2. Apakah hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki pelayanan atau strategi sosialisasi PBB?
5.	Partisipan Masyarakat	1. Menurut Bapak partisipasi masyarakat itu penting atau tidak untuk mencapai target pajak bumi bangunan (PBB)?

PEDOMAN WAWANCARA

“Peranan lurah dalam pencapaian target pajak bumi bangunan di kelurahan jatimulya kecamatan tambun selatan”

No	Indikator	Pertanyaan
1.	Sosialisasi dan Edukasi	1. Bagaimana bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan Jatimulya terkait pembayaran PBB dan Apakah kegiatan sosialisasi tersebut melibatkan RT/RW atau tokoh masyarakat setempat? (Sosialisasi) 2. Menurut bapak, Sejauh mana edukasi yang dilakukan berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB? (Edukasi)
2.	Fasilitas dan Pelayanan	1. Seberapa cepat dan efektif pelayanan diberikan kepada warga yang ingin melakukan konsultasi atau pembayaran PBB? 2. Apa saja fasilitas yang disediakan oleh kelurahan untuk menunjang proses pelayanan PBB (cth: loket pembayaran, ruang konsultasi, komputer/sistem informasi)? dan apakah fasilitas tersebut memadai untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dalam urusan pembayaran PBB? (fasilitas)
3.	Koordinasi dan Kolaborasi	1. Bagaimana kerja sama antara kelurahan dengan pihak lain seperti RT/RW, tokoh masyarakat, atau Bapenda dalam

		meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB? 2. Seberapa sering pihak kelurahan mengingatkan kewajiban membayar pbb?
4.	Pengawasan dan Evaluasi	1. Bagaimana keterlibatan Lurah dalam memantau proses pelayanan PBB kepada masyarakat?
5.	Partisipasi Masyarakat	1. Apa langkah-langkah yang telah diambil oleh RT/RW untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB?

Lampiran 4 pedoman wawancara Masyarakat, kelurahan jatimulya kecamatan tambun selatan kabupaten Bekasi.

PEDOMAN WAWANCARA

“Peran lurah dalam pencapaian target pajak bumi bangunan di kelurahan jatimulya kecamatan tambun selatan”

No	Indikator	Pertanyaan
1.	Sosialisasi dan Edukasi	1. Sudah berapa lama bapak/ibu tinggal di di Kelurahan Jatimulya? dan Apakah Bapak/Ibu termasuk wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)? 2. Seberapa sering Bapak/Ibu menerima sosialisasi atau informasi terkait PBB dari pihak kelurahan? Apakah Bapak/Ibu merasa terbantu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kelurahan mengenai PBB? (Sosialisasi) 3. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa Lurah dan staf kelurahan aktif memberikan pemahaman atau edukasi tentang PBB? (edukasi)
2.	Fasilitas dan Pelayanan	1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya loket atau tempat khusus di kelurahan untuk mengurus atau membayar PBB? 2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap sikap dan pelayanan staf

		kelurahan saat mengurus pembayaran PBB?
3.	Koordinasi dan Kolaborasi	1. Seberapa sering Lurah atau perwakilan kelurahan berkoordinasi dengan warga melalui RT/RW atau pertemuan warga terkait PBB? 2. Apakah Bapak/Ibu merasa dilibatkan dalam kegiatan atau forum diskusi tentang kewajiban membayar PBB?
4.	Pengawasan dan Evaluasi	1. Seberapa sering pihak kelurahan (melalui RT/RW atau langsung) mengingatkan Bapak/Ibu tentang kewajiban membayar PBB? 2. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui adanya kegiatan evaluasi atau pertemuan warga terkait pembahasan capaian pembayaran PBB?
5.	Partisipasi Masyarakat	1. Apakah Anda pernah menghadiri sosialisasi atau pertemuan tentang PBB yang diselenggarakan oleh kelurahan? 2. Apa saran atau masukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB?

SKRIP WAWANCARA

Narasumber : Acep Eka Pradana, S.TP.
Jabatan : Lurah
Hari/Tanggal : Senin, 2 Juni 2025
Lokasi Wawancara : Kantor Kelurahan Jatimulya

A. Sosialisasi dan Edukasi

1. Sebagai Lurah, bagaimana strategi khusus yang digunakan kelurahan Jatimulya dalam men sosialisasikan pentingnya PBB kepada masyarakat?

Jawab:

strategi khusus tidak ada yng khusus yang normal” ajh seperti rapat minggon kalo ngga pasang sepanduk karna kita juga kelurahan hanya sebagai fasilitator penyampaian sppt.

2. Bentuk kegiatan sosialisasi apa saja yang dilakukan oleh pihak kelurahan Jatimulya terkait pembayaran PBB dan Apakah kegiatan sosialisasi tersebut melibatkan RT/RW atau tokoh masyarakat setempat? (Sosialisasi)

Jawab:

jelas itu kita melalui rapat minggon tadi melalui spanduk melalui media sosial WhatsApp dan lain lain kita menginformasikan pajak bumi bangunan dan lainnya.

3. Menurut bapak, Sejauh mana edukasi yang dilakukan berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB?

Jawab:

ya edukasi kita meberikkan ruang untuk membebaskan membayar pajak ya karna ada 1 2 kejadian zaman dahulu ada titip pembayaran di pak rt atau rw yng tidak tersampaikan pada saat di print out itu

masih ada piutang terutang nah itulah dari permasalahan itu pemerintah juga mengatur ulang aturan pembayaran pajak ini bahwa tugas pajak ataupun pihak kami tidak perlu lagi titip bayar untuk menghindari kejadian itu, jadi via online menghindari ketemu petugas pajak dan subjektif pajak.

B. Fasilitas dan Pelayanan

1. Apa saja fasilitas yang disediakan oleh kelurahan untuk menunjang proses pelayanan PBB (contoh: loket pembayaran, ruang konsultasi, komputer/sistem informasi)? dan apakah fasilitas tersebut memadai untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dalam urusan pembayaran PBB? (fasilitas)

Jawab:

kalo kami berbeda dengan kota Bekasi jadi di kelurahan jatimulya ini ataupun kelurahan lain nya dan desa lainnya tidak memiliki akses langsung loket untuk penerima pembayaran pbb itu td kita memberikan kebebasan terhadap masyarakat karna memang kewenangan ada di Uptd pbb wilayah 1 ini kita kelurahan hanya mensosialisasikan kalau biasanya strategi nya untuk mempercepat atau meningkatkan realisasi pbb di kelurahan jatimulya ini kita ada kan peling dengan saya sebagai lurah tersurat ke bapenda ataupun Uptd nanti kita tentukan tanggalnya biasanya di hari libur nah baru itu buat ngejar target pendapatan pbb itu bukan kita yng buka loket kita hanya menyapaikan dan memfasilitasi tempatnya ajh nanti pihak bang bjb atau Uptd nya disini kita fasilitas in di kelurahan

2. Bagaimana upaya kelurahan dalam memastikan bahwa staf yang melayani urusan PBB bersikap ramah, cepat, dan tanggap terhadap kebutuhan warga? (pelayanan)

Jawab:

ohh kalo di kita kan di pelayanan administrasi saja ya misalkan ada masyarakat memang mau memutasi pbb atau pemecahan atau mau

balik nama dan lain lainnya ya kita layanin ajah karna kita bentuk nya hanya surat keterangan pengantar bahwa menyatakan benar bidang tanah tersebut memiliki objek pajak sekian akan di balik nama yang lain atau pecahan dari indukan nomor objek pajak tapi harus ada dasar yng jelas juga kita proses sebagai pengantar ke pusat daerah bapenda.

C. Koordinasi dan Kolaborasi

1. Bagaimana Lurah memberikan arahan khusus kepada staf kelurahan atau petugas PBB dalam pelaksanaan tugasnya?

Jawab:

ya kerjasama ajh silakan kita membuka kok dari pihak bapenda ketika kelurahan untuk memfasilitasi membantu menyampaikan menginformasikan sosialisasikan segala macem ya kelurahan ngga itu mungkin langsung bapenda melalui perda yng baru tuh 2rbu sekian saya kurang paham juga karna bukan teknis nya yang jelas itu tadi membuka seluas luasnya bicara.

2. Apakah kelurahan menjalin kerja sama dengan lembaga lain (seperti bank, koperasi, atau lembaga masyarakat) dalam membantu proses pembayaran atau sosialisasi PBB?

Jawab:

pembayaran pbb itu lewat bank bjb dari toko pedia dan lain lain kalau kelurahan ngga ada kerjasama apapun karna kita tadi gk ada loker pembayaran.

D. Pengawasan dan Evaluasi

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu memastikan bahwa staf kelurahan menjalankan tugas pelayanan dan sosialisasi PBB dengan baik?

Jawab:

kalau untuk fungsi pengawasan ituu ada di Uptd 2kalau saya dari awal hanya memfasilitasi penyampaian sppt tersampaikan terhadap

masyarakat untuk masyarakat dari melalui rt rw kami ya untuk sosialisasi itu saja ya pastikan udh di bawah nya kita kan tinggal nerima, ooh waktu itu pernah ada yang komplek an nya “pak ini indukan saya udh di pecah nih kok muncul lagi pecahan nya misalkan indukan menjadi gk berkurang rugi dong saya udh bayar, baru kita betulkan sampaikan lagi ke bapenda bukan dalam kapasitas kita untuk dalam kewenangan itu hanya memfasilitasi saja.

2. Apakah Bapak/Ibu melibatkan staf, RT/RW, atau tokoh masyarakat dalam proses evaluasi dan perbaikan kinerja pencapaian PBB?

Jawab:

iya kalo itu kita sampaikan di rapat minggon dan evaluasi kmrn dapet berapa tahun sekarang berapa dan nanti kita undang juga pihak bapenda nya dan pendapatan desa staf pbb.

E. Partisipasi Masyarakat

1. Apa langkah-langkah yang telah diambil oleh BAPENDA dan Lurah Kelurahan Jatimulya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB?

Jawab:

Kalau untuk Langkah-langkahnya kan setiap di kelurahan membuat edaran atau rapat terkait PBB itu, pasti sudah atas naungan atau utusan dari BAPENDA karena staff PBB biasanya ikut serta dalam sosialisasi kemasyarakat disini.

SKRIP WAWANCARA

Narasumber : Pherry Pebriyanton, S. Kom
Jabatan : Staff PBB
Hari/Tanggal : Senin, 2 Juni 2025
Lokasi Wawancara : Kantor Kelurahan jatimulya

A. Sosialisasi dan Edukasi

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bertugas sebagai staf yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Jatimulya? dan Apa saja tugas dan tanggung jawab utama Bapak/Ibu dalam pengelolaan PBB?

Jawab:

Saya sudah bertugas sebagai staf yang menangani PBB di Kelurahan Jatimulya selama kurang lebih 6 tahun. Tugas utama saya meliputi:

- Pendataan objek pajak, termasuk perubahan-perubahan data tanah dan bangunan.
- Distribusi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kepada warga.
- Memberikan pelayanan informasi dan bantuan kepada masyarakat terkait PBB.
- Mengelola pelaporan dan rekapitulasi pembayaran PBB ke tingkat kecamatan atau kabupaten.
- Membantu sosialisasi dan edukasi terkait kewajiban pembayaran pajak kepada warga.

2. Apa saja bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan kelurahan untuk meningkatkan kesadaran warga membayar PBB?

Jawab:

Sosialisasi dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya:

Penyampaian informasi langsung ke RT/RW, yang kemudian diteruskan kepada warga, Pemasangan spanduk dan banner di titik-titik strategis seperti kantor kelurahan dan tempat ibadah.

Pengumuman melalui grup WhatsApp RT/RW dan media sosial kelurahan, Kegiatan tatap muka atau forum warga seperti musyawarah kelurahan, dan Pembagian brosur atau leaflet saat warga datang ke kelurahan untuk mengurus administrasi.

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat cukup menerima dan memahami informasi yang disampaikan melalui sosialisasi?

Jawab:

Secara umum, sebagian besar masyarakat menerima informasi dengan baik, terutama yang aktif di lingkungan RT/RW. Namun, masih ada sebagian warga yang kurang memahami atau belum menyadari pentingnya membayar PBB tepat waktu, terutama yang jarang mengikuti kegiatan lingkungan atau tinggal di daerah padat. Karena itu, kami terus berupaya menyampaikan informasi secara berulang dan dengan berbagai pendekatan, agar semua lapisan masyarakat dapat lebih sadar akan kewajiban ini.

4. Apakah edukasi yang dilakukan sudah mencakup berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang berpendidikan rendah atau lansia?

Jawab:

Kami berusaha agar edukasi menjangkau semua kalangan, namun memang masih ada tantangan. Kelompok lansia dan warga dengan pendidikan rendah terkadang kurang memahami istilah-istilah atau prosedur administratif, sehingga perlu pendekatan khusus. Karena itu, kami sering melibatkan RT/RW atau kader-kader lingkungan untuk membantu menjelaskan secara langsung dengan bahasa yang lebih sederhana. Ke depannya, kami berharap bisa meningkatkan metode komunikasi, misalnya dengan edukasi

berbasis visual atau video pendek, agar lebih mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

B. Fasilitas dan Pelayanan

1. Apakah ada dukungan teknologi informasi (seperti komputerisasi, aplikasi pajak, atau sistem pembayaran digital) untuk memudahkan pelayanan PBB?

Jawab:

Ya, saat ini sudah ada dukungan teknologi informasi dalam pelayanan PBB. Di antaranya adalah penggunaan aplikasi e-PBB yang terintegrasi dengan sistem pemerintah daerah, serta layanan pembayaran digital melalui berbagai kanal seperti bank, minimarket, dan aplikasi dompet digital (seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Gopay). Selain itu, data PBB juga sudah terkomputerisasi, sehingga pencarian data dan pencetakan SPPT bisa dilakukan lebih cepat dan akurat.

2. Seberapa cepat dan efektif pelayanan diberikan kepada warga yang ingin melakukan konsultasi atau pembayaran PBB?

Jawab:

Pelayanan kepada warga cukup cepat dan efektif. Untuk konsultasi, warga bisa langsung datang ke kantor kelurahan dan akan dibantu oleh petugas. Biasanya tidak memerlukan waktu lama, karena data sudah tersedia secara digital. Untuk pembayaran, karena sudah terintegrasi secara online, warga bisa melakukan pembayaran di luar jam kerja melalui aplikasi atau gerai yang bekerja sama. Hal ini sangat memudahkan warga dan mengurangi antrean di kantor kelurahan.

C. Koordinasi dan Kolaborasi

1. Bagaimana bentuk koordinasi antara Lurah dengan staf PBB dalam upaya pencapaian target PBB?

Jawab:

Koordinasi antara Lurah dan staf PBB dilakukan melalui rapat rutin internal yang membahas capaian target, kendala di lapangan, dan strategi percepatan. Lurah biasanya memberikan arahan dan dukungan kebijakan, serta menugaskan staf PBB untuk melakukan pendataan, penagihan aktif, dan pelayanan langsung kepada masyarakat. Selain itu, dalam momen-momen tertentu seperti menjelang jatuh tempo, dilakukan evaluasi bersama dan pembagian wilayah kerja agar pelaksanaan tugas lebih efektif dan merata.

2. Bagaimana kerja sama antara kelurahan dengan pihak lain seperti RT/RW, tokoh masyarakat, atau Bapenda dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB?

Jawab:

Ya, terdapat kerja sama yang cukup erat. RT/RW dilibatkan sebagai perpanjangan tangan kelurahan dalam menyampaikan SPPT, memberikan imbauan kepada warga, serta membantu mengidentifikasi warga yang belum membayar. Tokoh masyarakat sering diminta mendukung secara moral dan sosial agar masyarakat lebih patuh terhadap kewajiban pajak. Sedangkan dengan Bapenda, kelurahan berkoordinasi terkait pembaruan data wajib pajak, pelatihan teknis staf, serta penyediaan fasilitas pembayaran digital dan dukungan dalam kegiatan sosialisasi skala besar.

D. Pengawasan dan Evaluasi

1. Bagaimana keterlibatan Lurah dalam memantau proses pelayanan PBB kepada masyarakat?

Jawab:

Lurah terlibat secara aktif dalam memantau proses pelayanan PBB dengan cara melakukan supervisi langsung terhadap staf PBB, memantau pencapaian target pembayaran, serta menerima

laporan berkala dari staf terkait jumlah SPPT yang sudah dibagikan dan tingkat pembayaran yang sudah masuk. Selain itu, Lurah juga sering turun langsung ke lapangan, terutama saat kegiatan sosialisasi atau saat ada kendala yang dilaporkan oleh warga.

2. Apakah hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki pelayanan atau strategi sosialisasi PBB?

Jawab:

Ya, hasil evaluasi secara rutin digunakan sebagai dasar untuk perbaikan. Misalnya, jika ditemukan wilayah atau kelompok warga yang tingkat pembayarannya rendah, maka akan dilakukan pendekatan lebih intensif melalui RT/RW atau penambahan metode sosialisasi seperti pemasangan banner, media sosial, atau pengumuman di tempat ibadah. Evaluasi juga digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, misalnya dengan mempercepat proses cetak ulang SPPT, memperbaiki sistem antrian, atau menambah jam pelayanan saat menjelang batas akhir pembayaran.

E. Partisipasi Masyarakat

1. Menurut Bapak partisipasi masyarakat itu penting atau tidak untuk mencapai target pajak bumi bangunan (PBB)?

Jawab:

Tentu sangat penting, karena menurut saya dengan partisipasi masyarakat mereka jadi tau hak dan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi Bangunan. Tentu itu juga berpengaruh pada meningkatkan pendapatan Daerah.

SKRIP WAWANCARA

Narasumber : Halid
Jabatan : RT
Hari/Tanggal : Kamis, 05 juni 2025
Lokasi Wawancara : Rumah

A. Sosialisasi dan Edukasi

1. Bentuk kegiatan sosialisasi apa saja yang dilakukan oleh pihak kelurahan Jatimulya terkait pembayaran PBB dan Apakah kegiatan sosialisasi tersebut melibatkan RT/RW atau tokoh masyarakat setempat? (Sosialisasi)

Jawab:

Pihak Kelurahan Jatimulya melakukan kegiatan sosialisasi terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan secara berkala, ya paling menjelang jatuh tempo pembayaran PBB. Biasanya Sosialisasi yang dilakukan itu Penyampaian Informasi Melalui Rapat Koordinasi, Distribusi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Sosialisasi Melalui Media Digital.

2. Menurut bapak, Sejauh mana edukasi yang dilakukan berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB? (Edukasi)

Jawab:

edukasi yang dilakukan kelurahan sudah lumayan membantu. Sekarang warga jadi lebih tahu soal pentingnya bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Biasanya dari RT juga sering kasih info, baik lewat grup WhatsApp, pas kumpulan warga, atau langsung dikasih tahu dari rumah ke rumah.

Dari tahun ke tahun, warga yang sadar bayar PBB makin banyak. Tapi ya memang masih ada juga yang harus diingatkan terus, apalagi yang sudah lanjut usia atau yang jarang ikut kumpulan.

B. Fasilitas dan Pelayanan

1. Seberapa cepat dan efektif pelayanan diberikan kepada warga yang ingin melakukan konsultasi atau pembayaran PBB?

Jawab:

Kalau ada warga yang mau tanya-tanya soal tagihan atau gimana cara bayarnya, bisa juga langsung tanya ke staf kelurahan. Mereka bantu ngecek data kita, terus kasih tahu cara bayarnya gimana, bisa tunai atau online.

Tapi kalau pas lagi banyak warga datang barengan, kadang ya nunggu agak lama. Terutama di bulan-bulan menjelang jatuh tempo, soalnya yang bayar banyak.

2. Apa saja fasilitas yang disediakan oleh kelurahan untuk menunjang proses pelayanan PBB (cth: loket pembayaran, ruang konsultasi, komputer/sistem informasi)? dan apakah fasilitas tersebut memadai untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dalam urusan pembayaran PBB? (fasilitas)

Jawab:

di Kelurahan Jatimulya udah enggak ada lagi loket pembayaran langsung, semuanya sudah diarahkan pakai sistem online. Jadi kalau warga mau bayar PBB, harus lewat HP atau ke layanan online seperti mobile banking, Tokopedia, atau Indomaret.

Walaupun enggak bisa bayar di kelurahan, tapi petugas kelurahan tetap bantu kalau kita mau nanya. Misalnya, warga bingung cara bayar, lupa nomor NOP, atau mau ngecek tunggakan, nanti bisa datang langsung ke kantor dan dibantu lewat komputer petugas.

C. Koordinasi dan Kombinasi

1. Apakah ada kerja sama antara kelurahan dengan pihak lain seperti RT/RW, tokoh masyarakat, atau Bapenda dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB?

Jawab:

Iya, kalau menurut saya memang kerja sama antara kelurahan dengan RT/RW itu ada dan penting banget buat ngingetin warga soal bayar PBB. Biasanya kelurahan kasih info dulu ke RT, nanti RT terusin ke warga, baik lewat grup WhatsApp, pas kumpulan, atau langsung door to door. RT di sini aktif ngingetin. Kadang juga dikasih daftar siapa aja yang belum bayar dari kelurahan, terus kita bantu sampein ke warga.”

Kalau soal tokoh masyarakat, kadang juga dilibatkan. Misalnya pas ada acara lingkungan, tokoh masyarakat suka bantu sampaikan imbauan soal pentingnya bayar pajak, supaya warga merasa ini tanggung jawab bersama.

2. Seberapa sering pihak kelurahan mengingatkan kewajiban membayar pbb?

Jawab:

Biasanya pas awal tahun atau pas udah deket jatuh tempo, RT suka dapet info dari kelurahan, terus kita dikasih tahu juga, Selain itu, kadang juga grup WA lingkungan, biasanya juga dapet info dari situ.

Kalau saya sih tahunya dari grup WA RT, tiap tahun pasti ada pengingatnya.

D. Pengawasan dan Evaluasi

1. Bagaimana keterlibatan Lurah dalam memantau proses pelayanan PBB kepada masyarakat?

Jawab:

Kalau menurut saya, Pak Lurah cukup aktif dan peduli soal pelayanan PBB ini. Beliau enggak langsung turun tangan satu-satu, tapi sering ngontrol dan minta laporan dari staf atau RT soal gimana proses pembayaran dan apa aja kendalanya di lapangan.

Pak Lurah biasanya kumpulin RT/RW pas awal-awal musim PBB, tanya perkembangan, terus kasih arahan biar warga cepat bayar. Kadang juga ada rapat koordinasi, di mana Lurah ikut bahas bareng staf kelurahan dan RT/RW soal data siapa aja yang belum bayar, terus dicari solusi bareng-bareng.

“Saya pernah diajak rapat, Pak Lurah dengerin keluhan warga lewat kita-kita ini, terus langsung cari jalan keluarnya bareng.”

Walaupun enggak selalu hadir langsung saat pelayanan, tapi lurah tetap ikut pantau dan kasih arahan, supaya pelayanan tetap jalan lancar dan warga enggak bingung.

2. Bagaimana keterlibatan Lurah dalam memantau proses pelayanan PBB kepada masyarakat?

Jawab:

E. Partisipasi Masyarakat

1. Apa langkah-langkah yang telah diambil oleh RT/RW untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB?

Jawab:

Ngasih Info ke Warga, RT biasanya kasih tahu jadwal pembayaran, nominal tagihan, dan cara bayarnya. Info ini kadang dikasih langsung atau lewat grup WA warga. Memberikan SPPT Setelah dapat dari kelurahan, RT bantu bagi SPPT ke masing-masing warga supaya mereka tahu tagihan PBB-nya. Pendekatan Personal Kalau ada warga yang belum bayar, RT suka datengin atau sekadar ingetin baik-baik. Nggak maksa, tapi lebih ke ngajak. “Saya pernah diingetin RT, katanya jangan lupa bayar pajak biar enggak kena denda.”

SKRIP WAWANCARA

Narasumber : Siti Aikar
Jabatan : Masyarakat Kampung Rawa Sapi
Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Lokasi Wawancara : Rumah Warga

A. Sosialisasi dan Edukasi

1. Sudah berapa lama bapak/ibu tinggal di Kelurahan Jatimulya? dan Apakah Bapak/Ibu termasuk wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Jawab:

Saya sudah tinggal di Kelurahan Jatimulya selama kurang lebih 15 tahun. Ya, saya termasuk wajib pajak karena saya memiliki tanah dan bangunan atas nama sendiri, sehingga setiap tahun saya memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Seberapa sering Bapak/Ibu menerima sosialisasi atau informasi terkait PBB dari pihak kelurahan? Apakah Bapak/Ibu merasa terbantu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kelurahan mengenai PBB? (Sosialisasi)

Jawab:

Biasanya saya menerima sosialisasi atau informasi terkait PBB satu kali dalam setahun, biasanya menjelang jatuh tempo pembayaran. Informasinya bisa melalui RT/RW, pengumuman, atau selebaran. Saya merasa cukup terbantu karena melalui sosialisasi tersebut saya jadi tahu kapan harus membayar dan bagaimana proses pembayarannya, apalagi sekarang sudah bisa lewat aplikasi online.

3. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa Lurah dan staf kelurahan aktif memberikan pemahaman atau edukasi tentang PBB? (edukasi)

Jawab:

Menurut saya, Lurah dan staf kelurahan cukup aktif memberikan edukasi, terutama saat warga datang langsung ke kantor atau melalui kegiatan pertemuan warga. Mereka menjelaskan pentingnya membayar pajak tepat waktu dan manfaat PBB untuk pembangunan daerah. Meski begitu, mungkin ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi lewat media sosial atau papan pengumuman agar lebih banyak warga yang tahu.

B. Fasilitas dan Pelayanan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya loket atau tempat khusus di kelurahan untuk mengurus atau membayar PBB?

Jawab:

Ya, saya mengetahui bahwa di kantor kelurahan terdapat loket khusus atau bagian pelayanan yang menangani urusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di situ biasanya warga bisa mencetak ulang SPPT, berkonsultasi, atau menanyakan informasi seputar pembayaran PBB. Namun, untuk pembayarannya sendiri, saya biasanya lakukan secara online atau melalui minimarket terdekat.

2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap sikap dan pelayanan staf kelurahan saat mengurus pembayaran PBB?

Jawab:

Menurut saya, sikap dan pelayanan staf kelurahan cukup baik dan ramah. Mereka sabar dalam memberikan penjelasan, terutama kepada warga yang belum paham soal teknis pembayaran. Pelayanannya juga cepat dan tidak berbelit-belit, jadi saya merasa puas saat mengurus PBB di kelurahan.

C. Koordinasi dan Kolaborasi

1. Seberapa sering Lurah atau perwakilan kelurahan berkoordinasi dengan warga melalui RT/RW atau pertemuan warga terkait PBB?

Jawab:

Biasanya koordinasi dilakukan sekali dalam setahun, terutama saat mendekati masa pembayaran PBB. Informasi disampaikan melalui RT/RW, baik secara langsung maupun lewat grup WhatsApp warga. Kadang juga disampaikan saat rapat lingkungan atau pertemuan warga, meskipun tidak terlalu sering dan hanya bersifat pemberitahuan.

2. Apakah Bapak/Ibu merasa dilibatkan dalam kegiatan atau forum diskusi tentang kewajiban membayar PBB?

Jawab:

Secara umum, saya belum merasa benar-benar dilibatkan dalam forum diskusi khusus tentang kewajiban membayar PBB. Informasi lebih sering bersifat satu arah, berupa pengumuman atau imbauan. Namun jika ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, warga tetap diberi kesempatan untuk bertanya langsung ke RT atau ke kelurahan. Mungkin ke depannya forum diskusi atau sosialisasi bisa lebih sering dilakukan agar warga lebih memahami pentingnya membayar PBB.

D. Pengawasan dan Evaluasi

1. Seberapa sering pihak kelurahan (melalui RT/RW atau langsung) mengingatkan Bapak/Ibu tentang kewajiban membayar PBB?

Jawab:

Pihak kelurahan biasanya mengingatkan sekali dalam setahun, terutama saat pembagian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) melalui RT. Kadang juga ada pengingat tambahan menjelang jatuh tempo pembayaran, baik lewat grup WhatsApp RT

maupun pengumuman saat pertemuan warga. Namun, tidak setiap bulan ada pengingat, jadi sifatnya lebih musiman.

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kegiatan evaluasi atau pertemuan warga terkait pembahasan capaian pembayaran PBB?

Jawab:

Sejauh ini, saya belum pernah secara langsung mengikuti atau mendengar adanya pertemuan warga khusus yang membahas capaian pembayaran PBB. Biasanya pertemuan warga lebih umum sifatnya, tidak secara spesifik membahas evaluasi PBB. Jika ada, mungkin hanya di tingkat kelurahan atau internal RT, dan informasinya tidak selalu disampaikan ke seluruh warga secara terbuka.

E. Partisipasi Masyarakat

1. Apakah Anda pernah menghadiri sosialisasi atau pertemuan tentang PBB yang diselenggarakan oleh kelurahan?

Jawab:

Ya tentu pernah

2. Apakah Anda memiliki saran atau masukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB?

Jawab:

Kalau dari saya pribadi, mungkin ada beberapa saran biar warga makin semangat dan sadar buat bayar PBB.

Pertama, sosialisasinya jangan cuma pas mendekati jatuh tempo aja, tapi bisa lebih sering. Misalnya tiap awal tahun udah mulai diingetin, jadi warga bisa nyiapin uangnya dari jauh-jauh hari.

Kedua, kasih pemahaman ke warga soal manfaat bayar pajak, misalnya buat pembangunan jalan, saluran air, atau fasilitas umum. Soalnya masih banyak yang nganggep bayar PBB itu enggak penting.

SKRIP WAWANCARA

Narasumber : Annis
Jabatan : Masyarakat Kampung Rawa Sapi
Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2025
Lokasi Wawancara : Rumah Warga

A. Sosialisasi dan Edukasi

1. Sudah berapa lama bapak/ibu tinggal di di Kelurahan Jatimulya? dan Apakah Bapak/Ibu termasuk wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Jawab:

Sekitar 8 tahun saya tinggal disini, selama saya tinggal sih yang namanya pajak bangunan itu rutin wajib saya bayar selama tinggal disini.

2. Seberapa sering Bapak/Ibu menerima sosialisasi atau informasi terkait PBB dari pihak kelurahan? Apakah Bapak/Ibu merasa terbantu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kelurahan mengenai PBB? (Sosialisasi)

Jawab:

Saya termasuk orang yang sesekali ikut sosialisasi seperti itu, lebih sering dapat informasi dari tetangga saya yang update sama informasi, dan menurut saya sosialisasi dari kelurahan itu penting sih soalnya dari pengetahuan beberapa warga itu bisa nyebar ke warga yang lainnya apalagi kan ini mengenai pajak yaah.

3. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa Lurah dan staf kelurahan aktif memberikan pemahaman atau edukasi tentang PBB? (edukasi)

Jawab:

Yang saya lihat Lurah disini aktif ke masyarakat, paling kalo tidak lurah ya stafnya juga kadang kalau kita tanya diluar jam kerja juga mereka siap menjawab.

B. Fasilitas dan Pelayanan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya loket atau tempat khusus di kelurahan untuk mengurus atau membayar PBB?

Jawab:

Ya saya tahu karna waktu itu saya pernah berkonsultasi tentang sempat menunggak membayar pajak karna ekonomi sedang kurang baik dan staf disana memberikan penjelasan sih dan solusinya.

2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap sikap dan pelayanan staf kelurahan saat mengurus pembayaran PBB?

Jawab:

Cukup baik respon dari Pelayanan di kelurahan tuh kalo kita kurang paham soal PBB atau pembayarannya.

C. Koordinasi dan Kombinasi

1. Seberapa sering Lurah atau perwakilan kelurahan berkoordinasi dengan warga melalui RT/RW atau pertemuan warga terkait PBB?

Jawab:

Kaya yang tadi saya bilang sih, kurang tahu kalo seberapa seringnya, yang jelas dari pandangan saya pihak Lurah aktif ke masyarakat disini.

2. Apakah Bapak/Ibu merasa dilibatkan dalam kegiatan atau forum diskusi tentang kewajiban membayar PBB?

Jawab:

Tidak terlalu merasa dilibatkan, tapi ada tetangga saya yang sering ikut kegiatan tentang PBB itu dan dia memberi informasi juga ke warga setempat seperti saya.

D. Pengawasan dan Evaluasi

1. Seberapa sering pihak kelurahan (melalui RT/RW atau langsung) mengingatkan Bapak/Ibu tentang kewajiban membayar PBB?

Jawab:

Tidak sering sih, paling kalau lagi kumpul-kumpul sekedar mengingatkan saja sambil mengobrol dan itu jarang ya kalo ketemu ngingetin pbb.

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kegiatan evaluasi atau pertemuan warga terkait pembahasan capaian pembayaran PBB?

Jawab:

Saya hanya tahu tapi tidak terlibat kalo soal evaluasi itu.

E. Partisipasi Masyarakat

1. Apakah Anda pernah menghadiri sosialisasi atau pertemuan tentang PBB yang diselenggarakan oleh kelurahan?

Jawab:

Pernah sesekali jika saya ada waktu.

2. Apakah Anda memiliki saran atau masukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB?

Jawab:

Saran saya sosialisasi kemasyarakatnya itu jangan mendekati tempo pembayaran karna kita gatau ekonomi warga yang lain tuh seperti apa.

Lampiran Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



UNIVERSITAS ISLAM 45 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 88349033, 8801027, 8802015, 8808851 Ext. 130-131 Fax. (021) 8801192

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI
NOMOR SK :H.0025/UNISMA.FISIP/KD/II/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PADA PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI

- Menimbang : 1. Bahwa pada akhir masa pendidikan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMA Bekasi diwajibkan membuat skripsi/Tugas Akhir.
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penulisan skripsi, maka diperlukan pembimbing skripsi/tugas akhir.
3. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat menjadi Pembimbing Skripsi/tugas akhir.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. SK Rektor UNISMA Nomor 011/SK/UNISMA/RT/II/2006 tentang pemberlakuan Statuta UNISMA tanggal 01 Pebruari 2006;
4. Sk. Rektor UNISMA Nomor 128/SK/UNISMA/RT/K/VIII/2005 tentang kurikulum.
- Memperhatikan : 3. Pedoman Penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMA Bekasi.
4. Rapat Koordinasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tanggal 18 Maret 2013

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat saudara Muhammad Fadil, S.IP., M.Si.
Sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir dari mahasiswa
- N a m a : Anggri Aura Najaswa
N P M : 41183506200035
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Judul Skripsi : Peran Kelurahan Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Bngunan (PBB) di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
- Kedua : Penulisan skripsi/tugas akhir berlaku sampai dengan 30 Agustus 2025, bila dalam kurun waktu tersebut belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengganti judul skripsi / tugas akhir.
- Ketiga : Pembayaran bimbingan skripsi/ tugas akhir berlaku sampai dengan 30 Agustus 2025 bila dalam kurun waktu tersebut belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya bimbingan skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 20 Februari 2025
Dekan
Yanto Supriyatno, Dec., M.Si.

- Tembusan Disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
 2. Direktur DAPA UNISMA
 3. Dosen Pembimbing
 4. Mahasiswa
 5. Arsip

SK Bimbingan Skripsi ke-1

Lampiran Surat izin Penelitian di Kelurahan Jatimulya
Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi



UNIVERSITAS ISLAM 45
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 88349033, 8801027, 8802015, 8808851 Ext. 130-131 Fax. (021) 8801192

Nomor : H.0171/UNISMA.FISIP/E/IV/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian, Observasi, Wawancara
dan Pencarian Data untuk Keperluan Skripsi

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Lurah Jati Mulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi
di-
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi, maka mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Anggri Aura Najaswa
NPM : 41183506200035
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
No. Telepon : 089506268766
Dosen Pembimbing : Muhammad Fadil, S.IP., M.Si

Mohon diizinkan untuk dapat melakukan observasi, wawancara dan pencarian data untuk keperluan skripsi di bidang Ilmu Pemerintahan pada lembaga/kantor/instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun judul penelitian skripsi mahasiswa tersebut adalah :

Peran Lurah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Bangunan di Kelurahan Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan Kab. Bekasi

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Bekasi, 24 April 2025


Yanto Supriatno, Drs., M.Si.
NIP. : 45101071989005

Lampiran surat izin Penelitian dari Kesbangpol Kab. Bekasi ke UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah I Kab. Bekasi



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Instagram: kesbangpolkabbekasi
Email: badankesbangpol.kab.bekasi@gmail.com
B E K A S I

Bekasi, 06 Maret 2025
Kepada
Yth. Kepala UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah I Kab. Bekasi
di-
B E K A S I

Nomor : 400.14.5.4/230/Bakesbangpol/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam '45' Bekasi, Nomor Surat: H.0081/UNISMA.FISIP/E/II/2025, tanggal 25 Februari 2025, perihal: Permohonan Izin Penelitian, observasi, Wawancara dan Pencarian Data untuk Keperluan Skripsi, berkenaan hal tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **ANGGRI AURA NAJASWA**
Tempat/Tgl Lahir : Bekasi, 13-08-2002
NPM : 41183506200035
Jenjang/ Program Studi : (S.1)/ Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi / Universitas : Universitas Islam '45' Bekasi
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat Rumah : Kp.Rawa Sapi Rt 001 Rw 010 Kel/Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan – Kab.Bekasi
No. Telp/ HP / Email : 0895-0626-8766 / auranajaswaa@gmail.com

Bermaksud akan mengadakan Penelitian, Pengumpulan Data dan Wawancara dalam rangka menyelesaikan Skripsi dengan judul: **"PERAN KELURAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUIB BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN JATIMULYA KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI** yang akan dilaksanakan di lingkungan dan wilayah kerja Bapak/Ibu pimpin, adapun waktu pelaksanaan mulai **Maret s/d 31 Mei 2025**, apabila berkenan mohon kiranya kepada yang bersangkutan diberikan kemudahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan sepanjang tempat penelitian memberikan izin;
2. Melaporkan kedatangan kepada Instansi dimaksud dengan menunjukan surat ini;
3. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan tujuan akademik;
4. Apabila diatas tanggal **31 Mei 2025** kegiatan penelitian belum selesai, agar menyampaikan permohonan perpanjangan oleh instansi pemohon ditunjukan kepada Bupati Bekasi cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi;
5. Setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian wajib melaporkan hasilnya kepada Bupati Bekasi Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi;
6. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian agar maklum terima kasih.



Tembusan :

disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bekasi (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.Bekasi;
3. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam '45' Bekasi.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsSE) Badan Siber dan Sandi Negara

CS Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Acep Abdi Eka
selaku Lurah di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun
Selatan Kabupaten Bekasi



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Pherry Pebriyanto
Selaku Staf Pelayanan PBB di Kelurahan Jatimulya



Dokumentasi dengan Bapak Yudi selaku Kepala UPTD
Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah I Kab.
Bekasi



Dokumentasi wawancara dengan
Bapak Halid selaku RT di Kp. Rawa
Sapi, Kelurahan Jatimulya



Dokumentasi wawancara dengan
Ibu Siti Aikar selaku warga di Kp.
Rawa Sapi Kelurahan Jatimulya